

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Pemkab Kembali Raih Opini WTP
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Galamedia / Hal.4
Edisi	: Kamis, 31 Mei 2018

Pemkab Kembali Raih Opini WTP

SOREANG, (GM).-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung untuk yang kedua kalinya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017.

Hasil opini WTP tersebut diserahkan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat, Arman Syifa kepada Bupati Bandung, H. Dadang M. Naser di kantor BPK RI Perwakilan Jabar di Jln. Moch. Toha, Kota Bandung, Rabu (30/5).

Dadang M. Naser mengatakan, diraihnya kembali opini WTP oleh Pemkab Bandung merupakan wujud komitmen, tekad, semangat, dan kerja sama serta kerja keras dari seluruh jajaran DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mencip-

takan sistem pengelolaan keuangan dan aset yang mumpuni.

"Ini adalah prestasi sekaligus tantangan untuk kita semua. Artinya, dedikasi yang telah diberikan harus disertai dengan komitmen dan tekad yang kuat seluruh ASN dalam menjalankan pelaksanaan pembagunan, antara lain dengan menetapkan Perda APBD tepat waktu, pembenahan data aset dan tentunya dukungan doa seluruh masyarakat," ujar Dadang.

Menurutnya, pemeriksaan dan audit oleh BPK dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN). Antara lain meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja yang meliputi aspek ekonomi, aspek efisiensi dan aspek efektivitas. Kemudian pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemerik-

saan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksan kinerja.

"Tujuan pemeriksaan yang dilakukan BPK adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan Pemkab Bandung telah disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia," katanya.

Penyerahan LHP BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah 2017 dengan opini WTP, diberikan kepada 10 daerah di Jabar, yakni Kabupaten Bandung, Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Pangandaraan, Kabupaten Purwakarta, Kota Bekasi dan Kota Depok.

Dadang menambahkan, berdasarkan penilaian yang di-

lakukan BPK, penetapan opini WTP atas LHP LKPD mempertimbangkan tingkat kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

"Strateginya adalah bagaimana kita mengkolaborasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan, yang harus sesuai dengan kondisi pembangunan di Kabupaten Bandung," katanya.

Lebih baik

Sebelumnya Bupati pernah berharap agar Pemkab Bandung bisa mempertahankan opini WTP dari BPK pada 2017 sebagai prestasi. "Saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kinerja seluruh PD, ASN juga masyarakat yang telah memberikan dedikasi,

kerja keras, komitmen dan doa untuk keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung. Semoga bisa menjadi motivasi untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi," katanya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Jabar, Arman Syifa mengatakan, kualitas laporan yang disampaikan kabupaten/kota di Jabar untuk tahun anggaran 2017 sudah lebih baik. Namun, opini WTP bukan berarti tidak ada catatan untuk dilakukan perbaikan.

"Antara kepatuhan terhadap peraturan kualitas laporan keuangan Jawa Barat dengan implikasinya tahun ini umumnya lebih baik, relatif semakin baik, namun itu bukan berarti tidak ada catatan, semuanya harus terpicu meraih predikat terbaik," kata Arman. (B.122)*